Nurani: Jurnal Studi Agama dan Peradaban Spiritual
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 765 - 785
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Nurani/article/view/623
E-ISSN: 3124-9000

KEPEMIMPINAN KRISIS KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ: ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KONSOLIDASI POLITIK PASCA-WAFATNYA NABI (632–634 M)

Andi Candra Kirana[1], Andi Ahmad Afrisyal[2], Idrus L.[3]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: andicandrakirana152@gmail.com[1*], andiahmadafrisyal07@gmail.com[2], idruslatif.iainbone@gmail.com[3]

Info Artikel
Received: *08 Oktober 2026*
Revised : *19 Oktober 2026*
Accepted: *10 November 2026*
Published: *20 November 2026*

Keywords: *Abu Bakr al-Siddiq, crisis leadership, Usama expedition, Rashidun Caliphate, Qur'anic Compilation, Ridda Wars.*

Abstract
Abu Bakr al-Siddiq was the first caliph of the Rashidun Caliphate who led the Muslim community after the death of Prophet Muhammad in 632 CE. The leadership transition occurred under difficult circumstances as the Muslim community faced a leadership crisis, differences between the Ansar and the Muhajirin, as well as the emergence of apostasy movements, false prophets, and groups refusing to pay zakat. This study aims to analyze the process of Abu Bakr's appointment as caliph, his leadership characteristics, and the policies he implemented in addressing various challenges faced by the Muslim community. This research employs a qualitative method through library research, a historical approach, and content analysis. The findings indicate that Abu Bakr demonstrated firm, responsible, consultative, and unity-oriented leadership. His firmness in dealing with apostasy movements and the refusal to pay zakat played an important role in maintaining the integrity of the Islamic government. Furthermore, his decision to continue the expedition of Usama ibn Zayd and initiate the compilation of the Qur'an demonstrated his ability to maintain governmental continuity and preserve Islamic teachings. From the perspective of Crisis Leadership Theory, Abu Bakr's leadership reflects the ability to understand crises, make decisions, establish shared values, resolve conflicts, and learn from previous challenges.

Kata Kunci*:* Abu Bakar Ash-Shiddiq, crisis leadership, ekspedisi Usamah, Khulafaur Rasyidin, Kodifikasi Al-Qur'an, Perang Riddah.

Abstrak
Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada tahun 632 M. Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung dalam kondisi yang tidak mudah karena umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan, perbedaan pandangan antara kaum Anshar dan Muhajirin, serta munculnya berbagai gerakan riddah, nabi palsu, dan penolakan terhadap kewajiban zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, karakter kepemimpinannya, serta kebijakan yang diambil dalam menghadapi berbagai persoalan umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), pendekatan historis, dan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Bakar memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, bertanggung jawab, mengutamakan musyawarah, serta berorientasi pada persatuan umat. Ketegasannya dalam menghadapi gerakan riddah dan

penolakan zakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keutuhan pemerintahan Islam. Selain itu, kebijakannya dalam melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid dan menghimpun Al-Qur'an menunjukkan kemampuan dalam menjaga kesinambungan pemerintahan serta keberlangsungan ajaran Islam. Berdasarkan perspektif Crisis Leadership Theory, kepemimpinan Abu Bakar memperlihatkan kemampuan memahami krisis, mengambil keputusan, membangun pemahaman nilai, menyelesaikan konflik, dan melakukan pembelajaran untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad Saw. memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain menerima dan menyampaikan risalah sebagai Rasul Allah Swt., beliau juga berperan sebagai pemimpin masyarakat sekaligus pemerintahan di Madinah. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad Saw. membentuk kehidupan sosial yang berpedoman pada nilai-nilai keimanan, keadilan, persaudaraan, musyawarah, serta rasa tanggung jawab. Karena itu, wafatnya Nabi Muhammad Saw. pada tahun 632 M atau 11 H tidak hanya menjadi kehilangan besar bagi umat Islam dalam aspek keagamaan, tetapi juga memunculkan persoalan terkait keberlanjutan kepemimpinan dalam masyarakat Islam.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., kondisi umat Islam menghadapi situasi yang cukup sulit dan belum sepenuhnya kondusif. Para sahabat tidak hanya harus menerima kenyataan atas kepergian Rasulullah Saw., tetapi juga dihadapkan pada kebutuhan untuk segera menentukan sosok yang mampu meneruskan kepemimpinan dan mengatur kehidupan umat. Keadaan tersebut semakin rumit karena muncul perbedaan pendapat antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin mengenai pihak yang dianggap paling berhak serta memiliki kemampuan untuk memimpin umat Islam. Perbedaan pandangan ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah awal Islam karena perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat apabila tidak diselesaikan melalui pertimbangan yang bijaksana dan mengutamakan persatuan. (Harianto, 2023).

Penelitian mengenai kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Harianto (2023), misalnya, membahas kepemimpinan Abu Bakar dalam menghadapi berbagai persoalan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., terutama dalam

menjaga persatuan dan stabilitas umat. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya ketegasan dan tanggung jawab Abu Bakar dalam menghadapi kondisi yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan.

Hidayatullah (2025) lebih menekankan pada dinamika kepemimpinan Abu Bakar dalam menghadapi perubahan dan krisis yang terjadi pada awal pemerintahan Islam. Sementara itu, Fifi Sumanti (2024) membahas nilai-nilai kepemimpinan Abu Bakar yang berkaitan dengan keteladanan, tanggung jawab, ketegasan, serta upaya menjaga keutuhan umat. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya berkaitan dengan aspek sejarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang relevan untuk dikaji dalam konteks pemerintahan dan kepemimpinan modern.

Permasalahan umat tidak berhenti setelah Abu Bakar menjadi khalifah. Berbagai kelompok di Jazirah Arab melakukan pembangkangan. Sebagian kelompok menolak membayar zakat, sebagian mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan sebagian lainnya melepaskan hubungan politik dengan Madinah. Keadaan tersebut kemudian melahirkan konflik yang dikenal sebagai Perang Riddah. Kajian terbaru mengenai konsolidasi politik Abu Bakar menunjukkan bahwa Perang Riddah berkaitan erat dengan usaha mengembalikan otoritas pemerintahan dan menjaga persatuan masyarakat Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak hanya diarahkan pada penyelesaian berbagai persoalan yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., tetapi juga pada upaya menjaga keberlangsungan kehidupan umat Islam. Sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang dibaiat pada tahun 11 H, Abu Bakar berupaya mempertahankan keteraturan umat sekaligus menjaga keberlanjutan ajaran Islam. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada masa pemerintahannya adalah memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an setelah banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam Perang Yamamah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian krisis, tetapi juga mencakup langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan ajaran dan kehidupan umat Islam (Irfan, 2022).

Pembahasan mengenai kepemimpinan Abu Bakar masih cenderung dikaji berdasarkan aspek sejarah, nilai keteladanan, dan kebijakan pemerintahan secara terpisah. Belum banyak kajian yang menghubungkan berbagai kebijakan tersebut dalam satu kerangka analisis kepemimpinan krisis, khususnya dalam melihat bagaimana Abu Bakar memahami situasi krisis, mengambil keputusan, membangun legitimasi, dan melakukan konsolidasi setelah terjadinya perubahan kepemimpinan dari Nabi Muhammad Saw. kepada khalifah.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menghadapi krisis politik, sosial, dan keagamaan pada awal pemerintahan Islam. Kajian ini menggunakan perspektif crisis leadership untuk menganalisis proses pengambilan keputusan, ketegasan dalam menghadapi penolakan zakat dan gerakan riddah, serta kebijakan strategis seperti Ekspedisi Usamah bin Zaid dan pengumpulan Al-Qur'an. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kepemimpinan Abu Bakar sekaligus melihat relevansinya terhadap praktik kepemimpinan modern.

Pembahasan mengenai kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq penting karena masa pemerintahannya merupakan masa transisi antara kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masa transisi biasanya ditandai dengan ketidakpastian, sehingga dibutuhkan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas tanpa kehilangan prinsip dasar yang telah dibangun sebelumnya.

Kajian ini juga penting untuk memahami bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kedudukan sebagai penguasa. Kepemimpinan Abu Bakar memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin menghadapi perbedaan pendapat, menjaga persatuan, mengambil keputusan dalam kondisi krisis, serta mempertanggungjawabkan amanah yang diterimanya.

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan memahami proses pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Selain itu, pembahasan bertujuan untuk menganalisis karakter kepemimpinan Abu Bakar serta kebijakan-kebijakannya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul pada awal pemerintahannya.

Pembahasan ini juga bertujuan untuk memahami kontribusi Abu Bakar dalam menjaga persatuan umat Islam, mempertahankan stabilitas pemerintahan, melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid, serta menghimpun Al-Qur'an. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai nilai-nilai kepemimpinan yang dapat dipelajari dari pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis dan analisis isi (content analysis). Pendekatan historis digunakan untuk memahami berbagai peristiwa dan kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq berdasarkan konteks sejarah pada masa awal pemerintahan Islam. Sementara itu, analisis isi

digunakan untuk mengkaji informasi dari berbagai sumber secara sistematis guna memperoleh pemahaman mengenai karakter kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan.

Dalam penelitian ini, analisis sejarah dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber sejarah yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder, seperti kitab Al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibnu Katsir, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, buku sejarah Islam, serta artikel jurnal ilmiah. Kedua, kritik sumber, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap keaslian, kredibilitas, dan relevansi sumber yang digunakan, khususnya berkaitan dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, penolakan zakat, dan Perang Riddah. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan dan menghubungkan berbagai informasi sejarah dengan kerangka teori kepemimpinan krisis. Keempat, historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian sejarah yang sistematis, kritis, dan berdasarkan sumber yang telah dianalisis.

Analisis kepemimpinan Abu Bakar menggunakan Crisis Leadership Theory yang meliputi lima dimensi, yaitu sense-making, decision-making, meaning-making, terminating, dan learning. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep legitimasi kekuasaan yang mencakup legitimasi keagamaan, sosial-politik, dan administratif. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umat Islam Setelah Wafat Nabi Muhammad Saw. Dan Krisis Kepemimpinan

Abu Bakar ash-Shiddiq, putra dari Abu Quhafah, merupakan khalifah pertama dalam deretan alKhulafa’ al-Rasyidin yang memimpin antara tahun 632 hingga 634 M (11–13 H). Ia termasuk tokoh terkemuka dari suku Quraisy yang pertama kali memeluk Islam. Dalam catatan sejarah, ia dikenal dengan berbagai nama dan gelar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah at-Taimy, sementara ayahnya dikenal dengan julukan Abu Quhafah. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'bah, namun Rasulullah menggantinya menjadi Abdullah. Ia dijuluki Abu Bakar karena termasuk orang pertama yang menerima Islam, dan mendapat gelar al-Shiddiq karena dengan segera membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriyah atau 632 Masehi, umat Islam menghadapi kebingungan besar terkait siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin. Yang dimaksud sebagai pengganti di sini adalah dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin masyarakat, bukan sebagai rasul, karena kenabian adalah hak mutlak dari Tuhan dan bukan ranah

manusia (Hidayatullah, 2025).

Persoalan kepemimpinan kemudian berkembang dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Kaum Anshar berkumpul untuk membicarakan sosok yang dianggap layak memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Berita mengenai pertemuan tersebut kemudian diketahui oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ketiganya datang dan ikut dalam pembahasan. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan pemimpin berlangsung dalam situasi transisi yang penuh tekanan dan membutuhkan keputusan politik secara cepat.

Dalam pertemuan Saqifah, muncul pandangan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan sosial-politik masing-masing. Kaum Anshar merasa memiliki peran besar karena telah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad Saw. dan kaum Muhajirin setelah hijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum Muhajirin memiliki kedekatan historis dengan Nabi dan berasal dari Quraisy, sedangkan Bani Hasyim memiliki kedudukan khusus karena hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Saw. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan suksesi kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang paling layak menjadi pemimpin, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, kedudukan kelompok, dan penerimaan politik dalam masyarakat Muslim yang baru kehilangan pemimpinnya.

Dalam konteks tersebut, Abu Bakar berusaha mengarahkan pembicaraan kepada pentingnya menjaga kesatuan umat. Ia mengemukakan pertimbangan mengenai posisi kaum Muhajirin dan Anshar serta kebutuhan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Abu Bakar sendiri dikenal sebagai sahabat yang memiliki kejujuran dan integritas, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat Muslim. Karakter tersebut menjadi salah satu modal sosial dalam proses pembentukan legitimasi kepemimpinannya. (Fifi Sumanti, dkk 2024).

Jika dianalisis melalui perspektif sosiologi politik Islam, Saqifah memperlihatkan bahwa legitimasi kepemimpinan Abu Bakar terbentuk melalui beberapa unsur. Dari sisi agama, ia merupakan sahabat dekat Nabi yang memiliki kedudukan dan reputasi kuat di tengah umat. Dari sisi sosial, ia memperoleh penerimaan melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh utama umat. Sementara dari sisi politik dan administratif, pengangkatannya berkaitan dengan kebutuhan untuk segera membentuk otoritas yang mampu menjaga stabilitas masyarakat setelah wafatnya Rasulullah Saw. Dengan demikian, Saqifah tidak tepat jika hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai proses negosiasi politik dalam situasi transisi yang bertujuan mencegah kekosongan kepemimpinan (Harianto, 2023).

Dinamika tersebut juga menunjukkan bahwa legitimasi pemimpin dalam kondisi krisis tidak

cukup hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan atau kedudukan formal. Legitimasi membutuhkan penerimaan sosial, kemampuan melakukan musyawarah, serta kemampuan menyatukan kelompok yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda. Dalam hal ini, proses Saqifah memperlihatkan pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam membangun kesepakatan ketika masyarakat berada dalam kondisi rentan terhadap konflik. Pengangkatan Abu Bakar kemudian menjadi tahap awal dari upaya membangun kembali stabilitas politik umat Islam.

Namun, krisis kepemimpinan belum berakhir setelah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Pemerintahan baru segera menghadapi berbagai persoalan yang mengancam stabilitas umat, seperti munculnya kelompok yang menolak membayar zakat, kelompok yang melepaskan diri dari otoritas pemerintahan Madinah, serta tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi, salah satunya Musailamah al-Kadzdzab. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi Abu Bakar bukan hanya krisis suksesi, tetapi berkembang menjadi krisis legitimasi dan otoritas pemerintahan.

Keadaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk krisis kepemimpinan yang menuntut seorang pemimpin untuk mampu membaca situasi, mengambil keputusan, dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Dalam perspektif Crisis Leadership, kondisi seperti ini membutuhkan kemampuan sense-making, yaitu memahami sumber dan perkembangan krisis, kemudian dilanjutkan dengan decision-making untuk menentukan tindakan yang dianggap mampu menjaga keberlangsungan organisasi atau pemerintahan. Dalam konteks Abu Bakar, tantangan tersebut semakin nyata ketika penolakan zakat, gerakan riddah, dan munculnya nabi-nabi palsu mulai mengancam otoritas pemerintahan Madinah.

Dengan demikian, kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. menunjukkan adanya perubahan besar dari kepemimpinan kenabian menuju kepemimpinan politik dan pemerintahan. Peristiwa Saqifah menjadi titik awal proses pembentukan legitimasi Abu Bakar, sedangkan berbagai gerakan penolakan dan pemberontakan setelahnya menjadi ujian terhadap legitimasi tersebut. Respons Abu Bakar terhadap krisis inilah yang kemudian memperlihatkan karakter kepemimpinannya, terutama dalam mempertahankan integritas hukum, otoritas pemerintahan, dan persatuan umat Islam.

Proses Pengangkatan Abu Bakar dan Karakter Kepemimpinannya

Pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq berlangsung dalam situasi politik yang penuh tekanan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Dalam pertemuan Saqifah Bani Sa’idah, masing-masing kelompok menyampaikan pertimbangan mengenai sosok yang dianggap layak memimpin umat. Abu

Bakar mengakui jasa kaum Anshar dalam membantu Nabi Muhammad Saw. dan kaum Muhajirin, sekaligus menjelaskan kedudukan kaum Muhajirin dalam perjuangan awal Islam. Ia juga menyebut Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai tokoh yang dapat menjadi pemimpin. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak sejak awal menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pilihan, tetapi berusaha mengarahkan proses musyawarah kepada sosok yang dapat diterima oleh umat. (Harianto, 2023).

Proses pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah menjadi bagian penting dalam perkembangan sejarah pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Dalam keadaan umat yang membutuhkan seorang pemimpin, Abu Bakar kemudian menjalankan peran kepemimpinan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah berkembang sejak masa Rasulullah Saw. Kepemimpinannya menjadi awal dari periode Khulafaur Rasyidin yang memiliki peran penting dalam melanjutkan pemerintahan dan menjaga keberlangsungan kehidupan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw (Kartini & Wahyuni, 2023).

Jika dilihat melalui konsep legitimasi kekuasaan, proses pengangkatan Abu Bakar dapat dipahami melalui beberapa dimensi. Pertama, legitimasi keagamaan, yaitu penerimaan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai sahabat dekat Nabi Muhammad Saw. serta reputasi keagamaannya sebagai al-Shiddiq. Kedua, legitimasi sosial-politik, yaitu penerimaan yang dibentuk melalui proses musyawarah dan baiat setelah peristiwa Saqifah. Ketiga, legitimasi pemerintahan, yang tidak berhenti pada proses pengangkatan, tetapi kemudian diperkuat melalui kemampuan Abu Bakar menjalankan pemerintahan dan menghadapi berbagai persoalan yang mengancam kesatuan umat.

Dengan demikian, legitimasi Abu Bakar tidak hanya dapat dipahami sebagai hasil dari baiat, tetapi juga sebagai sesuatu yang terus dibentuk melalui tindakan politik dan kebijakan selama masa pemerintahannya. Hal ini penting secara kritis karena legitimasi formal tidak secara otomatis menjamin stabilitas pemerintahan. Seorang pemimpin yang telah memperoleh pengakuan tetap harus membuktikan kemampuan menjalankan tanggung jawab, mengambil keputusan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat ketika menghadapi krisis.

Karakter kepemimpinan Abu Bakar juga tidak cukup dijelaskan hanya melalui sifat tegas atau bijaksana. Ketegasannya terlihat dalam keberaniannya mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan yang dianggap menyangkut prinsip dasar agama dan keberlangsungan pemerintahan. Namun, ketegasan tersebut tidak berarti menutup ruang musyawarah. Dalam proses pengambilan keputusan, Abu Bakar tetap mempertimbangkan pandangan para sahabat sebelum menetapkan

kebijakan. Dengan demikian, ketegasan dan musyawarah tidak harus dipahami sebagai dua hal yang bertentangan, tetapi dapat menjadi dua unsur yang saling melengkapi dalam kepemimpinan pada situasi krisis.

Dalam perspektif kepemimpinan krisis (Crisis Leadership), pola tersebut dapat dikaitkan dengan tahap decision-making, yaitu kemampuan pemimpin mengambil keputusan setelah memahami situasi dan mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia. Abu Bakar tidak hanya dituntut untuk memperoleh pengakuan sebagai khalifah, tetapi juga menghadapi keadaan yang membutuhkan keputusan cepat dan memiliki konsekuensi besar bagi keberlangsungan pemerintahan. Dengan demikian, karakter kepemimpinannya dapat dilihat dari hubungan antara kemampuan memahami krisis, melakukan musyawarah, dan menetapkan keputusan ketika kepentingan umum membutuhkan tindakan.

Literatur mengenai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin umumnya membahas Abu Bakar bersama Umar, Utsman, dan Ali dengan menekankan perkembangan pemerintahan, peradaban Islam, serta kontribusi masing-masing khalifah. Pola kajian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tentang Abu Bakar sering ditempatkan dalam kerangka sejarah kepemimpinan Islam secara umum. Karena itu, analisis terhadap Abu Bakar dapat diperdalam dengan melihat kepemimpinannya sebagai respons terhadap situasi krisis, terutama hubungan antara legitimasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan. (Juwita et al, 2026).

Secara kritis, pola kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa ketegasan tidak selalu identik dengan sikap otoriter. Ketegasan dapat muncul setelah proses pertimbangan dan musyawarah, terutama ketika seorang pemimpin menghadapi persoalan yang dianggap menyangkut prinsip dasar yang harus dipertahankan. Dalam konteks Abu Bakar, kemampuan menyeimbangkan penerimaan terhadap pendapat orang lain dengan keberanian mengambil keputusan menjadi bagian penting dari karakter kepemimpinannya.

Dengan demikian, karakter kepemimpinan Abu Bakar lebih tepat dianalisis melalui hubungan antara legitimasi, musyawarah, pengambilan keputusan, dan kemampuan merespons krisis. Musyawarah memberikan ruang bagi berbagai pandangan, legitimasi memberikan dasar penerimaan terhadap kepemimpinan, sedangkan ketegasan diperlukan ketika keputusan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Pola tersebut kemudian terlihat lebih konkret ketika Abu Bakar menghadapi penolakan zakat, munculnya nabi-nabi palsu, dan gerakan riddah yang mengancam kesatuan umat Islam.

Penolakan Zakat, Nabi Palsu, dan Riddah

Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, persoalan umat Islam belum berakhir. Berbagai bentuk pembangkangan muncul di sejumlah wilayah Arab. Sebagian kelompok menolak melanjutkan hubungan politik dengan pemerintahan Madinah, sebagian mengikuti tokoh yang mengaku sebagai nabi, dan sebagian lainnya menolak membayar zakat. Rangkaian konflik tersebut kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Riddah. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., pemerintahan Abu Bakar menghadapi krisis yang tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan keberlangsungan otoritas politik.

Riddah pada masa Abu Bakar memiliki dimensi keagamaan, politik, dan sosial yang saling berkaitan. Sebagian kelompok menganggap bahwa setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, kewajiban mereka untuk tunduk kepada pemerintahan Madinah juga berakhir. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Abu Bakar bukan hanya menyangkut keyakinan pribadi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan otoritas pemerintahan dan kesatuan umat Islam. Dalam kondisi tersebut, pemimpin dituntut untuk membedakan antara perbedaan yang masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan tindakan yang telah mengarah pada pembangkangan terhadap otoritas pemerintahan.

Selain persoalan nabi palsu dan gerakan pembangkangan, penolakan terhadap zakat menjadi persoalan yang sangat serius. Zakat memiliki kedudukan sebagai kewajiban agama sekaligus mempunyai fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pengelolaan zakat berkaitan dengan distribusi harta, kepedulian sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, zakat pada masa pemerintahan Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kehidupan sosial dan ekonomi umat. (Nurpadilah dkk, 2026)

Sebagian kelompok beranggapan bahwa kewajiban menyerahkan zakat kepada pemerintahan Madinah berakhir setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar menolak pandangan tersebut. Baginya, zakat merupakan bagian dari kewajiban agama yang memiliki hubungan erat dengan shalat dan tidak dapat dipisahkan begitu saja dari ketentuan syariat. Sikap tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan sahabat mengenai cara menghadapi kelompok yang menolak membayar zakat.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dilema antara fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi dan integritas hukum yang harus dipertahankan. Umar bin Khattab pada awalnya mempertanyakan tindakan memerangi kelompok yang masih mengucapkan syahadat, sedangkan Abu Bakar memandang bahwa penolakan terhadap zakat tidak dapat dibiarkan karena dapat memisahkan kewajiban yang telah menjadi satu kesatuan dalam ajaran Islam. Abu Bakar kemudian menegaskan bahwa ia akan memerangi pihak yang membedakan antara shalat dan zakat. Pernyataan tersebut

menunjukkan bahwa keputusan Abu Bakar didasarkan pada pandangan bahwa mempertahankan zakat berarti mempertahankan integritas ajaran sekaligus otoritas pemerintahan. (Haerunnisa, Fatmatu, 2025).

Riwayat dalam Shahih Muslim juga memperkuat gambaran mengenai perbedaan pandangan tersebut. Dalam riwayat yang membahas sikap Abu Bakar setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., disebutkan bahwa Abu Bakar tetap berpegang pada kewajiban zakat dan menolak pemisahan antara kewajiban shalat dan zakat. Umar bin Khattab kemudian memahami bahwa keputusan Abu Bakar tersebut didasarkan pada prinsip yang kuat dalam ajaran Islam. Riwayat ini menunjukkan bahwa persoalan zakat pada masa awal pemerintahan Abu Bakar tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan pemeliharaan kewajiban agama dan keteraturan umat. Dengan demikian, Shahih Muslim menjadi salah satu sumber primer yang penting untuk memahami dasar keagamaan dari sikap Abu Bakar dalam menghadapi kelompok yang menolak zakat. (Al-Hajjaj, 2023).

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa ketegasan Abu Bakar tidak muncul tanpa proses pertimbangan. Musyawarah tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, tetapi hasil musyawarah tidak berarti bahwa seluruh prinsip dapat dikompromikan. Dalam konteks ini, Abu Bakar membedakan antara ruang untuk mempertimbangkan strategi dan ruang untuk mempertahankan prinsip yang dianggap mendasar. Dengan demikian, musyawarah dan ketegasan tidak menjadi dua hal yang bertentangan, tetapi bekerja pada tahap yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif Crisis Leadership Theory, tindakan Abu Bakar juga dapat dipahami melalui tahap meaning-making, yaitu upaya pemimpin memberikan pemahaman mengenai makna dan arah tindakan yang diambil dalam menghadapi krisis. Ketegasan Abu Bakar terhadap penolakan zakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan kewajiban agama, tetapi juga menjadi upaya menegaskan bahwa wafatnya Nabi Muhammad Saw. tidak berarti berakhirnya kewajiban agama dan keteraturan umat. Dengan demikian, sikap tersebut memberikan pemahaman bahwa kehidupan keagamaan dan pemerintahan tetap memiliki kesinambungan setelah masa kenabian berakhir.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Abu Bakar kemudian memasuki tahap decision-making, yaitu menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis. Ia menghadapi keadaan yang mendesak, adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat, serta ancaman terhadap stabilitas pemerintahan. Keputusan untuk menghadapi kelompok penolak zakat dan gerakan riddah karena itu tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyebut Abu Bakar sebagai pemimpin yang tegas. Keputusan

tersebut merupakan hasil pertimbangan terhadap ancaman yang dinilai dapat melemahkan integritas agama sekaligus otoritas pemerintahan.

Tindakan terhadap kelompok yang melakukan pembangkangan kemudian berkembang menjadi Perang Riddah. Dalam perspektif kepemimpinan krisis, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan tahap terminating, yaitu upaya mengendalikan dan mengakhiri krisis agar tidak terus berkembang. Perang Riddah dengan demikian tidak hanya dapat dipahami sebagai konflik bersenjata, tetapi juga sebagai bagian dari usaha mengembalikan otoritas pemerintahan Madinah dan menyatukan kembali kelompok-kelompok yang sebelumnya melepaskan diri dari otoritas tersebut. Kajian kontemporer melihat strategi Abu Bakar dalam menghadapi Riddah sebagai bagian dari proses konsolidasi politik dan penguatan solidaritas umat.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa respons Abu Bakar terhadap krisis Riddah memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu mempertahankan prinsip dan memulihkan stabilitas. Ketegasan digunakan sebagai instrumen untuk menghadapi ancaman yang dinilai dapat merusak integritas agama dan pemerintahan, sedangkan tujuan akhirnya adalah mengembalikan keteraturan dan persatuan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan Abu Bakar dalam menghadapi penolakan zakat, nabi palsu, dan gerakan riddah menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam situasi krisis membutuhkan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai pandangan sekaligus menetapkan batas terhadap persoalan yang dianggap fundamental.

Ekspedisi Usamah dan Pengumpulan Al-Qur'an

Salah satu kebijakan strategis Abu Bakar setelah menjadi khalifah adalah melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid. Ekspedisi tersebut telah dipersiapkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebelum wafat. Setelah wafatnya Nabi, kondisi Madinah menjadi tidak stabil dan muncul kekhawatiran bahwa keberangkatan pasukan justru dapat melemahkan pertahanan pusat pemerintahan. Namun, Abu Bakar tetap mempertahankan keputusan untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kepemimpinan tidak secara otomatis membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keputusan Abu Bakar dapat dipahami sebagai bentuk konsistensi terhadap kebijakan Nabi Muhammad Saw. sekaligus upaya mempertahankan kesinambungan pemerintahan. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk merespons ancaman yang sedang berlangsung, tetapi juga menjaga agar pemerintahan tetap memiliki arah dan tidak mengambil keputusan secara panik. Abu Bakar mempertahankan ekspedisi tersebut dengan pertimbangan bahwa kebijakan yang

telah ditetapkan sebelumnya tetap memiliki dasar untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama dan kepentingan umat.

Menurut analisis penulis, keberangkatan pasukan Usamah juga memiliki dampak politik dan psikologis. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Madinah masih mampu menjalankan fungsi politik dan militernya meskipun baru mengalami kehilangan pemimpin utama. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ekspedisi militer, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kewibawaan dan kesinambungan pemerintahan.

Kebijakan strategis lainnya adalah penghimpunan Al-Qur'an dalam satu kumpulan. Kebijakan ini muncul setelah sejumlah penghafal Al-Qur'an gugur dalam Perang Yamamah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan transmisi Al-Qur'an apabila jumlah para penghafal terus berkurang. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar agar ayat-ayat Al-Qur'an segera dihimpun. Pada awalnya, Abu Bakar merasa ragu karena tindakan tersebut belum pernah dilakukan dalam bentuk penghimpunan satu kumpulan pada masa Nabi Muhammad Saw. Namun, setelah mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan umat, Abu Bakar menerima usulan tersebut dan menugaskan Zaid bin Tsabit untuk melaksanakan proses penghimpunan Al-Qur'an.

Proses penghimpunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber tertulis dan hafalan yang tersedia. Kajian mengenai sejarah kodifikasi Al-Qur'an menjelaskan bahwa penghimpunan pada masa Abu Bakar berkaitan dengan kebutuhan menjaga keberlangsungan transmisi Al-Qur'an setelah wafatnya sejumlah penghafal. (Arsyad, Aisyah, Abdul Ghany, 2026). Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya merupakan respons terhadap peristiwa Yamamah, tetapi juga bentuk antisipasi terhadap risiko yang dapat muncul apabila proses transmisi Al-Qur'an tidak segera diperkuat.

Dari perspektif kepemimpinan krisis, keputusan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan decision-making dan learning. Abu Bakar menghadapi masalah yang muncul dari kondisi aktual, tetapi keputusan yang diambil diarahkan untuk mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar pada masa mendatang. Dalam konteks ini, kehilangan para penghafal Al-Qur'an dapat dipandang sebagai risiko sistemik terhadap keberlangsungan transmisi pengetahuan keagamaan apabila tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, penghimpunan Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, tetapi juga pada pencegahan risiko jangka panjang.

Kedua kebijakan tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan Abu Bakar yang berusaha

menjaga kesinambungan sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kondisi baru. Pada ekspedisi Usamah, ia mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam situasi yang penuh tekanan. Sementara dalam penghimpunan Al-Qur'an, ia menerima kebijakan baru setelah mempertimbangkan kebutuhan dan risiko yang dihadapi umat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam situasi krisis tidak selalu berarti mempertahankan semua hal secara kaku, tetapi juga membutuhkan kemampuan membedakan kebijakan yang harus dilanjutkan dan persoalan baru yang membutuhkan inovasi kelembagaan.

Kebijakan Abu Bakar pada masa awal pemerintahannya menunjukkan adanya upaya mempertahankan kesenimbambungan pemerintahan Islam sekaligus Menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kondisi umat. Dalam konteks ini, pelaksanaan ekspedisi usama dan penghimpunan Al-Qur'an dapat dipahami sebagai dua bentuk respon yang berbeda terhadap situasi yang dihadapi (Imawan, 2021).

Dengan demikian, ekspedisi Usamah dan penghimpunan Al-Qur'an menunjukkan keputusan strategis Abu Bakar. Ekspedisi Usamah memperlihatkan kesinambungan kebijakan dan pemeliharaan otoritas pemerintahan, sedangkan penghimpunan Al-Qur'an memperlihatkan kemampuan mengantisipasi risiko dan membangun respons kelembagaan terhadap persoalan jangka panjang. Kedua kebijakan tersebut memperkuat gambaran Abu Bakar sebagai pemimpin yang tidak hanya merespons krisis, tetapi juga berusaha menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kehidupan umat Islam.

Konsolidasi Pemerintahan dan Warisan Kepemimpinan Abu Bakar

Berbagai kebijakan yang diambil Abu Bakar dalam menghadapi krisis secara bertahap memberikan pengaruh terhadap stabilitas pemerintahan Islam. Setelah menghadapi gerakan riddah, nabi palsu, dan penolakan zakat, otoritas pemerintahan Madinah kembali menguat. Perang Riddah dalam konteks tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi bagian dari proses mengembalikan otoritas pemerintahan dan solidaritas masyarakat Islam.

Namun, konsolidasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Abu Bakar juga mempertahankan musyawarah, membangun hubungan dengan para sahabat, serta melanjutkan prinsip-prinsip pemerintahan yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini menunjukkan bahwa konsolidasi memiliki dimensi politik dan sosial. Pemerintahan yang stabil tidak hanya membutuhkan kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga membutuhkan kepercayaan masyarakat dan penerimaan terhadap otoritas pemimpin.

Jika dikaitkan dengan Crisis Leadership Theory, tahap ini dapat dipahami sebagai proses terminating dan learning. Setelah krisis berhasil dikendalikan, pemimpin perlu mengembalikan fungsi pemerintahan sekaligus mengambil pelajaran dari krisis yang telah terjadi. Dalam konteks Abu Bakar, pengalaman menghadapi berbagai pembangkangan memperlihatkan pentingnya menjaga kesatuan otoritas, memperkuat koordinasi, dan mempertahankan prinsip yang dianggap fundamental bagi kehidupan umat.

Warisan penting Abu Bakar terlihat dari kemampuannya melewati masa transisi yang penuh tekanan dan memberikan dasar pemerintahan yang lebih stabil bagi kepemimpinan berikutnya. Masa pemerintahannya memang relatif singkat, tetapi kebijakan yang diambil memiliki dampak terhadap keberlangsungan pemerintahan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh kemampuan seorang pemimpin menghadapi persoalan strategis dan meninggalkan kondisi pemerintahan yang dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.

Penghimpunan Al-Qur'an juga menjadi salah satu bagian penting dari warisan pemerintahan Abu Bakar. Kebijakan tersebut memperkuat upaya pemeliharaan transmisi Al-Qur'an dan menjadi salah satu tahap penting dalam sejarah kodifikasi Al-Qur'an, yang kemudian dilanjutkan dengan standardisasi mushaf pada masa Utsman bin Affan. Dengan demikian, kebijakan Abu Bakar tidak hanya memberikan dampak dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam keberlangsungan kehidupan keagamaan umat Islam. (Arsyad, Aisyah, Abdul Ghany, 2026).

Dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibn Kathir memuat riwayat mengenai penghimpunan Al-Qur’an pada masa Abu Bakar setelah banyak penghafal Al-Qur’an gugur dalam peperangan. Berdasarkan riwayat tersebut, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar ayat-ayat Al-Qur’an dihimpun, kemudian Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk melaksanakan proses tersebut. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya berorientasi pada stabilitas politik, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber utama ajaran Islam. Dengan demikian, konsolidasi pada masa Abu Bakar mencakup aspek pemerintahan sekaligus pemeliharaan kehidupan keagamaan umat. (As-Shulami, 2019).

Pada akhirnya, kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq dapat dipahami sebagai fase penting dalam proses transisi dan konsolidasi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Ia menghadapi masyarakat yang berada dalam kondisi penuh ketidakpastian dan meresponsnya melalui kombinasi musyawarah, ketegasan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan pemerintahan. (Kurniawan, Dadan, 2025).

Menurut analisis penulis, warisan terpenting dari kepemimpinan Abu Bakar bukan hanya keberhasilannya menghadapi berbagai konflik, tetapi juga kemampuannya menjaga keberlangsungan pemerintahan Islam pada masa transisi yang sangat kritis. Ia meletakkan dasar stabilitas yang memungkinkan kepemimpinan setelahnya melanjutkan pemerintahan dan mengembangkan kehidupan masyarakat Islam. Dengan demikian, warisan Abu Bakar dapat dilihat dalam dua aspek yang saling berkaitan, yaitu pemulihan stabilitas pemerintahan dan penguatan fondasi keberlanjutan umat Islam.

Relevansi dan Implikasi Kepemimpinan Abu Bakar terhadap Praktik Kepemimpinan Modern

Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki relevansi dalam memahami praktik kepemimpinan modern, terutama dalam menghadapi situasi krisis dan perubahan. Relevansi tersebut bukan berarti seluruh kebijakan Abu Bakar dapat diterapkan secara langsung pada masa sekarang, tetapi nilai dan pola kepemimpinannya dapat dijadikan bahan pembelajaran. Dalam perspektif Crisis Leadership, seorang pemimpin dituntut mampu memahami situasi, menentukan keputusan, mengoordinasikan tindakan, dan melakukan pembelajaran setelah krisis. (Ronald , Riggio, 2023). Hal tersebut dapat dilihat dari cara Abu Bakar menghadapi kondisi umat Islam setelah wafat Nabi Muhammad Saw., ketika terjadi ketidakstabilan politik, munculnya kelompok yang menolak kewajiban zakat, serta berbagai gerakan yang mengancam persatuan umat. Kemampuan membaca kondisi dan menentukan langkah pada situasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam masa krisis membutuhkan kejelasan arah dan keberanian mengambil keputusan.

Proses musyawarah dalam pengangkatan Abu Bakar dan ketegasannya dalam menghadapi penolakan zakat menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam situasi krisis membutuhkan kemampuan menyesuaikan cara mengambil keputusan dengan kondisi yang dihadapi. Musyawarah memberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum keputusan ditetapkan, sedangkan ketegasan diperlukan ketika keadaan menuntut tindakan yang jelas. Kajian mengenai kepemimpinan dalam tim krisis menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif maupun direktif dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan karakter situasi dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi (Post Corinne, 2022). Dalam konteks Abu Bakar, pola tersebut dapat dilihat dari adanya proses pertimbangan bersama sebelum keputusan diambil, kemudian diikuti dengan tindakan yang tegas ketika persoalan dianggap mengancam keberlangsungan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan modern tidak hanya membutuhkan keterbukaan terhadap masukan, tetapi juga kemampuan menentukan tindakan secara bertanggung jawab sesuai dengan situasi.

Relevansi kepemimpinan Abu Bakar dengan kepemimpinan modern juga dapat dilihat dari pentingnya kualitas pribadi seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kepemimpinan dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengarahkan dan mengelola suatu kelompok, tetapi juga membutuhkan wawasan, moral, serta nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam menjalankan kepemimpinan. Nilai tersebut dapat dikaitkan dengan kepemimpinan Abu Bakar yang mengutamakan tanggung jawab, ketegasan, dan pertimbangan dalam menghadapi persoalan umat. Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut tetap relevan karena seorang pemimpin dituntut tidak hanya mampu mencapai tujuan organisasi, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah kepemimpinannya (Alwan Suban, 2022).

Selain itu, kebijakan Abu Bakar dalam melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid dan mengupayakan pengumpulan Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan pemerintahan dan pembelajaran dari situasi krisis. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah yang sedang terjadi, tetapi juga dengan kemampuan memperkuat sistem agar lebih siap menghadapi persoalan berikutnya. Kajian mengenai management learning menunjukkan bahwa pengalaman menghadapi krisis dapat menjadi dasar bagi proses sense-making, pengambilan keputusan, dan pembelajaran organisasi untuk menghadapi ketidakpastian berikutnya. Dalam praktik modern, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui evaluasi terhadap kebijakan, perbaikan sistem, penguatan koordinasi, serta penyusunan langkah jangka panjang setelah suatu krisis berlalu.

Dalam sumber primer Islam, karakter kepemimpinan Abu Bakar juga dapat dilihat melalui riwayat dalam Shahih al-Bukhari. Riwayat tersebut menggambarkan sikap Abu Bakar yang tetap menjalankan keputusan Rasulullah Saw. terkait ekspedisi Usamah bin Zaid meskipun setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. kondisi umat sedang menghadapi ketidakstabilan. Sikap tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi terhadap keputusan yang telah ditetapkan serta keberanian mempertahankan kebijakan dalam situasi yang penuh tekanan. Dalam konteks kepemimpinan modern, sikap tersebut dapat dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap keputusan organisasi yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sekaligus kemampuan pemimpin menjaga arah kepemimpinan ketika menghadapi perubahan (Baqi, 2017).

Dengan demikian, relevansi kepemimpinan Abu Bakar dapat dilihat pada kemampuan memahami situasi, membuka ruang pertimbangan, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan menjadikan pengalaman krisis sebagai dasar untuk memperkuat keberlanjutan organisasi.

Tabel 1. *Matriks Operasionalisasi Crisis Leadership Theory pada Kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq*

Dimensi teori	Permasalahan	Kebijakan abu bakar
Sense-making (Pembacaan Krisis)	Perbedaan pandangan kaum anshar dan Muhajirin setelah wafatnyanya Nabi	Menghadiri pertemuan Saqifah dan mengarahkan musyawarah untuk menjaga persatuan
Meaning-making (Pembentukan makna)	Penolakan sebagian kelompok terhadap kewajiban zakat	Menegaskan bahwa kewajiban zakat tetap berlaku dan tidak dapat di pisahkan dari shalat.
Desicion-making (Pengambilan keputusan)	Kekhawatiran terhadap kondisi keamanan Madinah	Tetap melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid
Terminating (Penyelesaian krisis)	Munculnya gerakan riddah, nabi palsu, dan pembangkangan terhadap pemerintah	Melakukan tindakan untuk mengembalikan otoritas pemerintahan melalui perang Riddah.
Leaning (Pembelajaran)	Banyaknya penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam Perang Yamamah	Menerima usulan Umar bin Khattab dan memerintahkan penghimpunan Al-Qur'an melalui Zaid bin Tsabit.

Berdasarkan matriks tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak hanya ditunjukkan melalui ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan, tetapi juga melalui kemampuan memahami situasi, mengambil keputusan, dan mempertahankan keberlangsungan pemerintahan. Setiap kebijakan yang diterapkan memiliki hubungan dengan bentuk krisis yang dihadapi pada masa pemerintahannya. Dimensi sense-making terlihat dalam upayanya memahami perbedaan kepentingan antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dimensi meaning-making tercermin melalui penegasan kewajiban zakat sebagai bagian dari ajaran Islam. Sementara itu, decision-making terlihat dalam keputusan melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid. Dimensi terminating tampak dalam upaya menyelesaikan gerakan riddah, sedangkan learning tercermin melalui kebijakan

penghimpunan Al-Qur'an setelah Perang Yamamah. Dengan demikian, kelima dimensi tersebut memperlihatkan hubungan antara kemampuan seorang pemimpin dalam memahami krisis, menetapkan kebijakan, dan menjaga stabilitas pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, dapat disimpulkan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah pada masa yang penuh dengan ketidakstabilan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Proses pengangkatannya melalui musyawarah dan baiat menunjukkan pentingnya persatuan dalam menentukan kepemimpinan umat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Abu Bakar menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas, berani, sederhana, bertanggung jawab, serta tetap mengedepankan musyawarah.

Berbagai krisis seperti gerakan riddah, munculnya nabi-nabi palsu, dan penolakan terhadap zakat menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Abu Bakar mampu menghadapi persoalan tersebut sehingga persatuan dan stabilitas umat Islam dapat dipertahankan. Selain itu, kebijakan melanjutkan ekspedisi Usamah bin Zaid serta penghimpunan Al-Qur'an menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi juga memikirkan kepentingan umat untuk masa yang akan datang.

Dengan demikian, kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan kepemimpinan masa transisi yang berhasil mengubah kondisi umat dari keadaan penuh krisis menuju keadaan yang lebih stabil. Warisan terpentingnya adalah terjaganya persatuan umat Islam, kuatnya kembali pemerintahan Madinah, serta adanya dasar penting bagi perkembangan pemerintahan Khulafaur Rasyidin setelahnya.

SARAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber sejarah dan kajian konseptual mengenai kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam melalui analisis komparatif mengenai strategi kepemimpinan dan manajemen militer pada masa Perang Riddah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji secara khusus dokumen sejarah dan riwayat instruksi Abu Bakar kepada para panglima untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai sistem pemerintahan, pengambilan keputusan, serta konsolidasi politik pada masa Khulafaur Rasyidin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisabur. (2023). *SHAHIH MUSLIM*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Arsyad, Aisyah, Abdul Ghany, and S. N. (2026). Sejarah Kodifikasi Al-Quran Periode Awal Islam. Historiografi Pembentukan Mushaf dari Era Abu Bakar hingga Kodifikasi Utsmani. *Jurnal Tafsere*, *14*(1), 50–83.

Ibnu Katsir, I. bin U.(2019). *AL-BIDAYAH WAN NIHAYAH (MASA KHULAFA'UR RASYIDIN*. (M. bin s. As-Sulami, Ed.; A.I. Al-Atsari, Penerj.). Darul Haq

Baqi, M. F. A. (2017). *SHAHIH BUKHARI MUSLIM (AL-LU'LU' WAL MARJAN*. Hikam Pustaka.

Irfan, A. H. (2022). *SEJARAH GENERASI AWAL*. Pustaka Al-Bayyinah.

Suban, A. (2022). *Manajemen Kepemimpinan Sebuah Kajian Normatif Islam dan Teori Kontemporer Modern*. Rajawali Pers.

Kartini, A., & Wahyuni, A. (2023). *SEJARAH ISLAM*. Universitas Islam Kalimantan MAB.

Fifi Sumanti, Refiana N.S, Hendi Pratama. M. Sholihin, Eka T.A, G. R. (2024). Peradapan Islam Pada MasaAbu BakarAsh-Shiddiq. *Jurnal Penelitian Dan Karya IlmiaH*, *2*(1), 297–311.

Haerunnisa F. (2025). Situasi dan Kondisi Umat Islam pada awal kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Journal of Educatio, Culture and Politics*, *5*(4), 814–826.

Harianto, Y. A. (2023). Kredibilitas Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Meredam Perpecahan Umat Islam pada Peristiwa Saqifah Bani Saidah. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, *5*(1), 69–88.

Hidayatullah, M. B., Kamila, W., Fernanda, T., Sejarah, P., Keguruan, F., Ilmu, D., & Sriwijaya, U. (2025). Masa Keemasan dan Kepemimpinan Kekhalifahan Abu Bakar As Shidiq. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(4), 2090–2100.

Imawan, D. H. (2021). *Sejarah Peradaban dan Dinamika Hukum Islam Periode Rasulullah saw dan al-Khulafa al-Rasyidun*. Universitas Islam Indonesia.

Juwita Arleni Kasmah, Ratu Ramadhani Harahap, Ressa Desniana, S. S. (2026). PERADABAN ISLAM PADA PERIODE KHULAFAUR RASYIDIN (632–661 M): TRANSFORMASI TATA KELOLA, TIPE KEPEMIMPINAN, DAN KONTRIBUSI TERHADAP PEMBENTUKAN PERADABAN. *Cemara Jurnal*, *IV*(Iii), 1–15.

Kurniawan, Dadan, H. C. N (2025). Muhammad The Great Leader: Meneladani Prisip Kepemimpinan Visioner Rasulullah. In *Afdan Rojabi Publisher*.

Nurpadilah, S. L., Sudrajat, S. R., & Kamilah, S. N. (2026). Kebijakan Zakat Pada Masa Khalifah Abu Bakar : Analisis Dampak Perang Riddah Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Journal of History and Islamic Civilization*, *1*(1), 34–50.

Post Corinne, Hans De smet, Sjir Uitdewilligen, Bert Schreurs, J. L. (2022). Participative or directive leadership behaviors for decision-making in crisis management teams? *Small Group Reserch*, *53*(5), 692–724.

Ronald E, Riggio, T. N. (2023). Crisis leadership. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, *10*(1), 201–224.